

## **Peranan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur Dalam Peningkatan Kualitas Penduduk**

*(The Role of Local Governments in The Province of East Java on Increase The Quality of The Population)*

Fatimah, Nanik Istiyani, Moh. Adenan  
Jurusan IESP, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: fatimah.iesp@gmail.com

### **Abstrak**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur kualitas atau derajat perkembangan manusia dari hasil pembangunan ekonomi. Rendahnya indeks pembangunan manusia akan berakibat pada rendahnya produktifitas kerja dari penduduk. Provinsi dengan laju pertumbuhan IPM paling rendah di Pulau Jawa adalah di Provinsi Jawa Timur. Rendahnya nilai IPM ini membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan itu dapat berupa anggaran-anggaran yang dikeluarkan dalam upaya peningkatan kualitas penduduk. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terutama pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.

**Kata Kunci:** *Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur.*

### **Abstract**

*Human Development Index (HDI) is indicator to measure the quality or degree of human development from the results of economic development. The low of human development index would result in low productivity employment of the population. The province with the lowest HDI growth rate on the island of java is in the province of east java. Low HDI value requires the right policies from the government of east java. The policy can be either budgets expended in efforts to improve the quality of the population. This research analyzed the influence of government spending, especially in the sectors of education, health and infrastructures to increase the Human Development Index in the province of East Java. The analysis method to be used in this research is multiple linear regression analysis. The result of this research is that the government expenditure variable education sector, health sector and Infrastructure sector significantly influence the Human Development Index.*

**Keywords:** *Human Development Index, Government Expenditure in Educatio, Government Expenditure in Health, Government Expenditure in Infrastructure.*

### **Pendahuluan**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk dari integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Percepatan terjadinya perdagangan bebas atau diberlakukannya MEA ini menuntut adanya kesiapan dari warga negara anggota MEA itu sendiri. Berdasarkan fakta yang dirilis *Human Development Report*, Indonesia masih berada di peringkat 108 pada tahun 2012 dan tidak mengalami peningkatan pada tahun 2013. Tidak adanya peningkatan pada angka indeks pembangunan manusia di Indonesia ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya pembenahan dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Rendahnya nilai IPM di Indonesia juga menunjukkan rendahnya daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya

manusia. Pendidikan dan kesehatan merupakan modal dari penduduk yang kompetitif dan produktif. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi merupakan upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktifitas perekonomian yang maju (Usmaliadanti, 2011).

Kualitas penduduk juga akan meningkat dengan adanya fasilitas infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh pelosok wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga dengan adanya fasilitas infrastruktur yang memadai dan bagus secara tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas penduduk. Pada tabel berikut akan disajikan perbandingan Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013

Tabel 1. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia
Jawa Barat	73,58
DKI Jakarta	78,59
Jawa Tengah	74,05
Yogyakarta	77,37
Jawa Timur	73,54

Sumber : Badan Pusat Statistik

Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki nilai IPM paling rendah adalah di Provinsi Jawa Timur yaitu hanya sebesar 73,54. Sedangkan nilai IPM Indonesia tahun 2013 sebesar 73,81. Rendahnya nilai IPM ini mencerminkan rendahnya kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur, sehingga campur tangan pemerintah diperlukan dalam meningkatkan nilai IPM melalui pengeluaran-pengeluaran pada pembangunan manusia.

Kebijaksanaan fiskal yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi dan tanpa inflasi. Kebijakan fiskal harus mendorong investasi ke jalur *over head sosial* dan *ekonomi* yang diinginkan masyarakat secara optimal, seperti investasi di bidang transportasi, perhubungan, pengembangan tenaga dan investasi di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat dan fasilitas latihan teknik ditujukan untuk *over head sosial*. Kedua kategori investasi ini menghasilkan ekonomi eksternal, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas dan eksternal, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi (Suryana, 2000:109).

## Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *cross section* tahun 2013 per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Objek penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan mengamati pengeluaran pemerintah yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Khususnya pada anggaran-anggaran bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku, literatur, jurnal dan yang berhubungan dengan penelitian. Jenis penelitiannya menggunakan analisis deskriptif.

## Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya. Analisis data dalam penelitian ini diestimasi dengan analisis regresi linear berganda yang menggunakan uji hipotesis dan uji asumsi klasik menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS).

Model regresi linear berganda yang digunakan adalah

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + b_3 X_{3i} + e$$

Keterangan:

Y : IPM Kabupaten/Kota

X<sub>1</sub> : Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan

X<sub>2</sub> : Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan

X<sub>3</sub> : Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur

## Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan terhadap model adalah uji statistik-f, uji statistik-t dan uji koefisien determinasi. Dalam hal ini pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah digunakan sesuai dengan kenyataan dengan menggunakan alat bantu hitung SPSS.

### Uji Statistik f

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Yaitu untuk mengetahui apakah variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh secara simultan terhadap variabel kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan asumsi  $\alpha = 5\%$ , bila probabilitas  $f_{hitung} \leq \alpha$ , berarti H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, artinya ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bila probabilitas  $f_{hitung} > \alpha$ , berarti H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak, artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.

### Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>) yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y<sub>i</sub>) yaitu kualitas penduduk di provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan asumsi  $\alpha = 5\%$ , bila probabilitas  $t_{hitung} \leq \alpha$ , berarti H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, artinya ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bila probabilitas  $t_{hitung} > \alpha$ , berarti H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak, artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.

### Uji Koefisien Determinasi

Menurut Gujarati (1995), koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan dengan variasi dari variabel independen. Beberapa r<sup>2</sup> dikenal sebagai koefisien determinasi (sampel) dan merupakan besaran yang paling lazim digunakan untuk mengukur kebaikan-suai (*goodness of fit*) garis regresi. Secara verbal, r<sup>2</sup> mengukur proporsi (bagian) atau prosentase total varians dalam y yang dijelaskan oleh model regresi. r<sup>2</sup> merupakan besaran non negatif Batasnya adalah  $0 \leq r^2 \leq 1$ . Suatu r<sup>2</sup> sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan r<sup>2</sup> yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian dari asumsi untuk membuktikan bahwa variabel-variabel bebas dalam suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan lainnya. Adanya multikolinieritas dapat menyebabkan model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir variabel independen. Gejala multikolinieritas juga dapat dideteksi dengan melihat besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*). Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinieritas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

#### Uji Heteroskedastisitas

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:66). Dasar pengambilan keputusan antara lain, jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (*point-point*) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Uji Autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah regresi yang digunakan ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode sekarang dengan periode sebelumnya. Uji Autokorelasi dalam penelitian kali ini menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW) yang dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai D-W hitung dengan batas-batas kritis *Durbin-Watson*. Nilai DW berkisar antara 0 sampai dengan 4. Apabila nilai d ada dikisaran angka 1,54-2,46 maka tidak ada autokorelasi, dan bila d ada dikisaran angka 0-10 maka ada autokorelasi positif dan seterusnya.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Dasar pengambilan keputusan antara lain, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan variabel indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah

bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum diestimasi dengan analisis regresi linier berganda yang menggunakan uji hipotesis dan uji asumsi klasik menggunakan metode OLS memakai software SPSS.

$$IPM = 74.579 + 0.383X_1 + 0.225X_2 + 0.311X_3$$

Nilai konstanta pada persamaan diatas menunjukkan nilai yang positif. Positif berarti menunjukkan bahwa bila variabel independen naik atau berpengaruh maka variabel dependen akan naik atau terpenuhi. Nilai konstanta pada persamaan ini memang sudah tinggi, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Faktor tersebut karena dana alokasi umum dari pemerintah pusat pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sudah cukup tinggi dan efisien. Sehingga nilai konstantanya sudah menunjukkan nilai yang cukup tinggi.

Hasil estimasi kode diatas dapat diinterpretasikan bahwa nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan di Jawa Timur sebesar 0,383 dimana ketika pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan ini naik 1 milyar maka akan mempengaruhi kualitas penduduk (IPM) sebesar 0,383%. Secara statistik pengeluaran pemerintah bidang pendidikan signifikan pada nilai yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Pada Tabel *coefficients* ditunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki nilai signifikansi 0,001. Nilai signifikansi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan lebih kecil dari  $\alpha$ ,  $0,001 < 0,05$  atau pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Jawa Timur, yang berarti bahwa setiap ada peningkatan pada pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan di Jawa Timur maka kualitas penduduk di Jawa Timur akan meningkat.

Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan di Jawa Timur sebesar 0,225 dimana ketika pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan ini naik 1 milyar maka akan mempengaruhi kualitas penduduk (IPM) sebesar 0,225%. Secara statistik pengeluaran pemerintah bidang kesehatan signifikan pada nilai yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Pada Tabel *coefficients* ditunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki nilai signifikansi 0,043. Nilai signifikansi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan lebih kecil dari  $\alpha$ ,  $0,043 < 0,05$  atau pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Jawa Timur, yang berarti bahwa setiap ada peningkatan pada pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan di Jawa Timur maka kualitas penduduk di Jawa Timur akan meningkat.

Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah pada bidang perumahan dan fasilitas umum di Jawa Timur sebesar 0,331 dimana ketika pengeluaran pemerintah pada bidang perumahan dan fasilitas umum ini naik 1 milyar maka akan mempengaruhi kualitas penduduk (IPM) sebesar 0,331%. Secara statistik pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum signifikan pada nilai yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Pada Tabel *coefficients* ditunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum memiliki nilai signifikansi 0,006. Nilai signifikansi

pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum lebih kecil dari  $\alpha$ ,  $0,006 < 0,05$  atau pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Jawa Timur, yang berarti bahwa setiap ada peningkatan pada pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum di Jawa Timur maka kualitas penduduk di Jawa Timur akan meningkat.

**Hasil Regresi Uji Hipotesis**

**Uji Statistik F**

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan. Uji F pada dasarnya digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Dari hasil pengujian Probabilitas F-statistik = 0,000 < nilai probabilitas  $\alpha = 5\%$ , berarti  $H_a$  diterima yang artinya semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen atau secara bersama-sama variabel independen yaitu variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur.

**Uji Statistik t**

Uji t dilakukan pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik t

Variabel	Probabilitas Hitung	( $\alpha=5\%$ )	Keterangan
Pendidikan	0,001	0,05	Signifikan
Kesehatan	0,043	0,05	Signifikan
Perumahan dan Fasilitas Umum	0,006	0,05	Signifikan

Sumber : Lampiran 2

Pada Tabel 2 diatas terlihat bahwa probabilitas hitung lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh secara parsial variabel independen yaitu variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum terhadap variabel dependen yaitu kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur.

**Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa besar proporsi variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan dengan seluruh variasi dari variabel independen. Pada regresi berganda digunakan adjust  $R^2$  bukan  $R^2$  karena adanya pertimbangan *Degree of Freedom*, untuk nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu.

Hasil pengujian menunjukkan nilai adjusted R-squared = 0,631 artinya total variasi kualitas penduduk mampu dijelaskan oleh variabel independen pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum sebesar 63,1% sedangkan sisanya 36,9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

**Hasil Regresi Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan uji yang harus dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik. Pada hakikatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan tidak efisien.

**Uji Multikolinieritas**

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

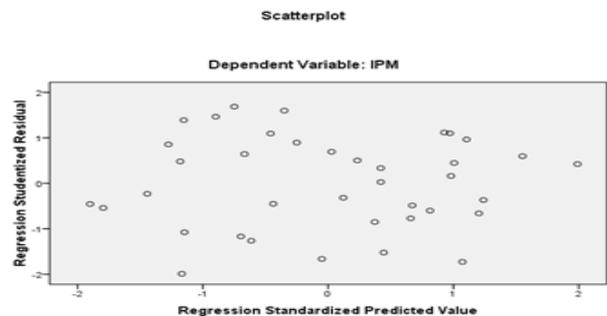
Test of Multikolinierity	VIF	Cutt off	Multikolinieritas
Pendidikan	1,472	< 10	Tidak Ada
Kesehatan	1,376	< 10	Tidak Ada
Perumahan dan fasilitas umum	1,281	< 10	Tidak Ada

Sumber : Lampiran 2

Tabel diatas merupakan hasil uji multikolinieritas. Pada Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. Masing-masing variabel menunjukkan nilai VIF kurang dari 10.

**Uji Heteroskedastisitas**

Dalam analisis regresi, apabila variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah maka data mengandung heteroskedastisitas. Pada penelitian ini cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola gambar scatterplot. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada Gambar 1 terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Uji Autokorelasi dalam penelitian kali ini menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW) yang dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai D-W hitung dengan batas-batas kritis *Durbin-Watson*. nilai DW berkisar antara 0 sampai dengan 4. Apabila nilai d ada dikisaran angka 1,54-2,46 maka tidak ada autokorelasi, dan bila d ada dikisaran angka 0-10 maka ada autokorelasi positif dan seterusnya.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DW	Keterangan
1,758	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber : Lampiran 2

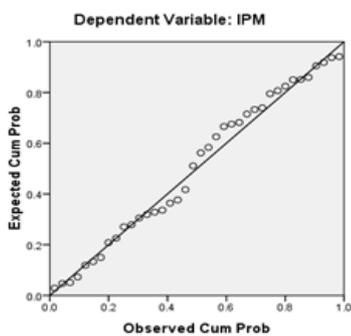
Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* dari persamaan diatas pada penelitian ini berada pada kisaran angka 1,54 sampai dengan 2,46, maka dapat dikatakan bahwa pada model persamaan regresi yang telah dirumuskan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji normalitas data dan uji normalitas model. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan ( $\alpha$ ) sebesar 5%.

Sedangkan uji normalitas model bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal. Cara mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan antara lain : Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Gambar 2 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Pada gambar terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi Jawa Timur terhadap Kualitas Penduduk di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil pengujian dari analisis regresi linier berganda, menunjukkan pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang Perumahan dan Fasilitas Umum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penduduk di Jawa Timur. Hasil pengujian dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang Perumahan dan Fasilitas Umum berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Penduduk di Jawa Timur dengan arah positif. Dari hasil uji data dengan menggunakan regresi linier berganda dapat dijelaskan melalui pembahasan pengaruh masing-masing variabel pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Kualitas Penduduk di Jawa Timur.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Kualitas Penduduk

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur. Kenaikan belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan ini akan menaikkan juga nilai IPM yang merupakan cerminan dari kualitas penduduk di daerah tersebut. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah atas pendidikan meningkat maka akan meningkatkan kualitas penduduk.

Menurut teori *human capital* bahwa investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif. Beberapa kegiatan yang menurut Schultz (1961:8) dapat memperbaiki kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan formal yang paling memiliki hubungan erat dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Teori ini meyakinkan bahwa pendidikan merupakan suatu yang baik bagi individu maupun masyarakat (Ananta, 1993:50).

Dari segi pandangan nasional pendidikan adalah penting, ditinjau dari sudut kepentingan individu maupun kepentingan negara. Bagi individu, pendidikan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dan ini akan meningkatkan pendapatannya pada masa mereka dewasa. Untuk negara secara keseluruhannya, peningkatan pendidikan dan kemahiran meningkatkan daya pikir dan

produktifitas dan oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi akan dipercepat. Berdasarkan hal ini, pemerintah perlu campur tangan dalam bidang pendidikan dengan mewajibkan anak-anak untuk mengikuti pendidikan sehingga ke suatu tingkat pendidikan tertentu (Sukirno, 2005:410).

Sesuai dengan teori *human capital* bahwa investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif, pengeluaran pemerintah atas pendidikan bersifat seperti investasi yang dapat langsung memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan atau kualitas individu. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan akan menghasilkan perbaikan di bidang pendidikan yang secara tidak langsung akan mengubah kualitas angkatan kerja yang kemudian meningkatkan produktifitas kerja. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 tertinggi di kota Surabaya dengan nilai Rp 1.518.768.324.981,00. Tingginya pengeluaran pemerintah untuk kota Surabaya di bidang pendidikan ini menyebabkan tingginya pula kualitas penduduk di kota Surabaya. Hal ini terlihat pada nilai IPM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 yang tertinggi di kota Surabaya sebesar 78,97 atau 0,7897%. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke 2013, hal ini berpengaruh positif dengan juga menaikkan IPM Jawa Timur dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 0,0071%. Hal ini berarti bahwa, kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan berpengaruh positif terhadap kenaikan nilai IPM di Jawa Timur.

Sesuai dengan hasil analisis, teori dan studi empiris yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa memang pengeluaran pemerintah bidang pendidikan secara positif berpengaruh terhadap peningkatan nilai IPM di Jawa Timur. Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Artaningtyas, Syari'udin dan Maryani (2011) menunjukkan hasil yang sama dari hasil analisis variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap IPM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Artaningtyas, Syari'udin dan Maryani menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.

#### Pengaruh Pengeluaran pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Kualitas Penduduk

Penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur. Kenaikan belanja pemerintah daerah di bidang kesehatan ini akan menaikkan juga nilai IPM yang merupakan cerminan dari kualitas penduduk di daerah tersebut. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah atas kesehatan meningkat maka akan meningkatkan kualitas penduduk.

Hasil analisis yang menunjukkan kenaikan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap peningkatan kualitas

penduduk di Provinsi Jawa Timur disebabkan oleh dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan maka penduduk Jawa Timur akan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Kemudahan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan ini akan menurunkan tingkat kematian dan tingkat kesakitan penduduk Jawa Timur. Peningkatan angka harapan hidup ini memberi kontribusi langsung pada nilai IPM. Penduduk yang sehat merupakan investasi dalam menciptakan kualitas angkatan kerja. Adanya angkatan kerja yang berkualitas ini akan mampu berproduksi dengan baik dan meningkatkan produktivitasnya.

Berdasarkan teori *human capital* bahwa investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif. Perbaikan gizi dan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktifitas kerja. Oleh sebab itu investasi yang dilaksanakan untuk perbaikan gizi dan kesehatan dapat dipandang sebagai salah satu aspek *human capital*.

Sejalan dengan teori *human capital* bahwa investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif, maka pengeluaran pemerintah atas kesehatan menjadi sangat penting. Pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran berupa sejumlah anggaran untuk kesehatan di Jawa Timur akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Jawa Timur.

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 tertinggi di kota Surabaya dengan nilai Rp 693.756.113.600,00. Tingginya pengeluaran pemerintah untuk kota Surabaya di bidang kesehatan ini menyebabkan tingginya pula kualitas penduduk di kota Surabaya. Hal ini terlihat pada nilai IPM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 yang tertinggi di kota Surabaya sebesar 78,97 atau 0,7897%. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke 2013, hal ini berpengaruh positif dengan juga menaikkan IPM Jawa Timur dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 0,0071%. Hal ini berarti bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan akan berpengaruh positif terhadap kenaikan nilai IPM di Jawa Timur.

Sesuai dengan hasil analisis, teori dan studi empiris yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa memang pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara positif berpengaruh terhadap peningkatan nilai IPM di Jawa Timur. Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Artaningtyas, Syari'udin dan Maryani (2011) menunjukkan hasil yang sama dari hasil analisis variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap IPM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Artaningtyas, Syari'udin dan Maryani menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.

### Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur Terhadap Kualitas Penduduk

Variabel pengeluaran atas bidang infrastruktur dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari bidang perumahan dan Fasilitas Umum. Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan Fasilitas Umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur. Kenaikan belanja pemerintah daerah di bidang Perumahan dan Fasilitas Umum ini akan menaikkan juga nilai IPM yang merupakan cerminan dari kualitas penduduk di daerah tersebut. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah atas Perumahan dan Fasilitas Umum meningkat maka akan meningkatkan kualitas penduduk.

Hasil analisis menunjukkan kenaikan pengeluaran pemerintah atas bidang perumahan dan fasilitas umum ini akan menaikkan kualitas daripada penduduk di daerah tersebut. Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi dapat terwujud. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Dengan terjadinya pemerataan pembangunan pada suatu daerah maka akan mempermudah penduduk daerah tersebut dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, baik aktivitas yang bersifat ekonomi maupun tidak.

Penyediaan perumahan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang hidup dengan keadaan perumahan yang layak dan mendapatkan fasilitas umum dengan mudah akan meningkatkan kehidupan masyarakat tersebut. Penduduk yang dapat hidup dengan layak akan berpengaruh pada produktivitasnya. Kemampuan atau produktifitas seseorang meningkat sejalan dengan meningkatnya kehidupan seseorang tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori dan hipotesis yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah atas infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur. Infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses pembangunan. Investasi pada prasarana infrastruktur menjadi suatu pilihan yang disukai. Besarnya total pengeluaran pemerintah dalam pengadaan infrastruktur khususnya perumahan dan fasilitas umum menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam proses pembangunan. Jumlah dan komposisi infrastruktur akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya demografi. Infrastruktur yang mempunyai produktifitas yang tinggi merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Perumahan dan fasilitas umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan, sehingga akan diperoleh kapasitas produktif dari sumber daya manusia (Hapsari, 2011).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan teori pengeluaran Wagner, teori Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah

semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. pengeluaran pemerintah yang relatif besar ini memberikan kesempatan kepada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk membiayai pembangunan daerah, khususnya pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan IPM.

Pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 tertinggi di kota Surabaya dengan nilai Rp 1.091.173.687.290,00. Tingginya pengeluaran pemerintah untuk kota Surabaya di bidang perumahan dan fasilitas umum ini menyebabkan tingginya pula kualitas penduduk di kota Surabaya. Hal ini terlihat pada nilai IPM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 yang tertinggi di kota Surabaya sebesar 78,97 atau 0,7897%. Pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke 2013, hal ini berpengaruh positif dengan juga menaikkan IPM Jawa Timur dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 0,0071%. Hal ini berarti bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah bidang perumahan dan fasilitas umum akan berpengaruh positif terhadap kenaikan nilai IPM di Jawa Timur.

Sesuai dengan hasil analisis, teori dan studi empiris yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa memang pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur secara positif berpengaruh terhadap peningkatan nilai IPM di Jawa Timur. Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Badrudin dan Khasanah (2011) menunjukkan hasil yang berbeda dari hasil analisis variabel pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur terhadap IPM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badrudin dan Khasanah menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY.

## Kesimpulan

### Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara simultan berpengaruh terhadap kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur dengan arah positif.
2. Anggaran pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini menunjukkan anggaran pada bidang pendidikan mampu meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka melek huruf.
3. Anggaran pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini menunjukkan anggaran pada bidang kesehatan mampu meningkatkan angka

harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia.

4. Anggaran pengeluaran pemerintah daerah bidang infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini menunjukkan anggaran pada bidang infrastruktur mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil per kapita.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah provinsi meningkatkan pengeluaran per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dituntut untuk mengoptimalkan tata kelola keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dialokasikan ke belanja pembangunan manusia.
2. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran-anggaran yang berpengaruh pada peningkatan IPM. Mengingat urusan wajib pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pendidikan, penanganan bidang kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana umum yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka anggaran masing-masing bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditingkatkan.

Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan oleh Dajan, 2000. Jakarta : Tri Aksara.

Hapsari, Tunjung. 2011. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta : Universitas Syarif Hidayatullah.

Latan, Hengky. 2013. *Analisis Multivariant Teknik dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.

Schultz, Theodore W. 1961. *Investment in Human Capital*. Amerika : American Economic Review.

Sukirno, Sadono. 2005. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan. Problematika dan Pendekatan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Usmaliadanti, Cristina. 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Perumahan dan fasilitas umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009*. Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang : Universitas Diponegoro.

## Daftar Pustaka

Ananta. 1993. *Ciri Demografis Penduduk dan Produktivitas Pekerja, Ciri Demografi Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Artaningtyas, Wahyu Dwi et all. 2011. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah*. Yogyakarta : Buletin Ekonomi.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Indeks Pembangunan Manusia*. Beberapa Edisi. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badrudin, Budi et all. 2011. *Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Buletin Ekonomi.